

PLURALISME SEBAGAI KENISCAYAAN DALAM MEMBANGUN KEHARMONISAN BANGSA

Abdullah Abd Talib
UIN Alauddin Makasar

I. Pendahuluan

Era sekarang terkadang disebut sebagai era postmodern, bahkan sebagian besar kalangan *futureology* menyebut sebagai zaman post-tradisional. Pengistilahan atas periodisasi zaman tersebut dilatarbelakangi oleh heterogenitas dan pluralitas pandangan manusia modern yang sementara mengalami kegelisahan dan keresahan jiwa dan pikirannya mengenai “trans-eksistensi” manusia modern. Tantangan besar bagi masyarakat sekarang adalah isu globalisasi, demokratisasi, pluralisme, dan—dalam keadaan tertentu—berbagai benturan kebudayaan diramalkan akan terjadi. Agama sesungguhnya mempunyai peran-peran strategis dan teleologis di era global tersebut dan agama (*al-Islam*)¹ mempunyai cita moral dalam pembangunan peradaban umat manusia.

1 Menurut Nurcholis Madjid, kata *al-Islam* itu sebenarnya bukan nama agama, tapi sikap. Nurcholis Madjid, *Dialog Keterbukaan Artikulasi Nilai Islam dalam Wacana Sosial Politik Kontemporer*, Cet.I; (Jakarta: Paramadina, 1998), hlm. 255. Bagi Abdullahi Ahmed An-Naim, seorang intelektual Sudan yang menjadi guru besar pada Emory University USA, lebih cenderung mengatakan bahwa Islam merupakan sebuah nilai dan karenanya perlu reinterpretasi yang lebih mendekati kontekstual. Lihat wawancara dengan Abdullahi Ahmed An-Naim, *Syariat Islam Tidak Bisa Melalui Hukum Positif* dalam jurnal *Tashwirul Afkar* Edisi No. 14 Tahun 2003, hlm. 164-165.

Saat ini kita hidup dalam dunia yang bergerak begitu cepat ke arah pluralisme dengan beragam agama, bahasa dan budaya sebagai akibat dari perkembangan modernisasi, liberalisasi dan globalisasi.² Di tengah gemerlap perubahan yang dahsyat itu, negeri kita justru memperlihatkan kultur sebaliknya: kekerasan, tidak adanya toleransi (*zero-tolerance*), dan konflik. Terutama dalam beberapa tahun terakhir banyak ketegangan dan konflik muncul yang sebagian besar dipicu oleh minimnya paham keberagamaan, etnik dan budaya yang pluralis. Karena itu, kita perlu menyegarkan kembali paham pluralisme agama. Bagi kita, umat Islam, masalah pluralisme agama merupakan agenda yang sangat penting, karena sebagian besar dari warga negara Republik ini beragama Islam.

Pluralitas tradisi agama atau yang lebih dikenal dengan fenomena pluralisme agama (*religious pluralism*) telah menimbulkan kehebohan besar belakangan ini. Banyak konflik dan ketegangan di zaman ini yang terjadi lantaran disulut oleh perbedaan pandangan agama. Agama yang semestinya mendatangkan keadilan dan kebahagiaan, dalam perjalanannya justru sering diperalat untuk melanggengkan penindasan dan perampasan hak-hak sesama manusia.

Menghadapi persoalan tersebut, para pemikir agama mencoba untuk merumuskan pelbagai pemecahan, sayangnya sebagian besar upaya pemecahan itu terbukti tidak lengkap dan membentur jalan buntu. Implikasi selanjutnya, alih-alih meredakan konflik dan ketegangan, upaya-upaya pemecahan itu justru secara *de facto* semakin memperuncing keadaan dan menjerumuskan para aktor yang bersangkutan dalam ruang konflik yang tak berujung pangkal. Oleh karena itu, makalah ini akan memfokuskan kajian pada bagaimana pandangan Islam tentang pluralisme dalam membangun kehamonisan bangsa.

II. Terminologi Pluralisme

Pluralisme secara etimologi terdiri dari dua kata yakni plural

2 Mun'im A. Sirry, *Membendung Militansi Agama: Iman dan Politik dalam Masyarakat Modern* (Jakarta: Erlangga, 2003) hlm. 70.

artinya banyak atau jamak³ dan isme artinya aliran atau paham. Kata plural berasal dari bahasa Inggris, *plural* antonim dari kata *singular*. Secara generik ia berarti kejamakan atau kemajemukan. Dengan perkata lain ia adalah kondisi obyektif dalam suatu masyarakat yang terdapat di dalamnya sejumlah kelompok saling berbeda baik secara ekonomi, ideologi, keimanan maupun latar belakang etnis.

Secara filosofis, pluralisme adalah sikap keagamaan dan kesedaran terhadap kenyataan adanya kemajemukan sebagai sebuah keniscayaan sekaligus ikut secara aktif memberikan makna signifikansinya dalam konteks pembinaan dan perwujudan kehidupan berbangsa ke arah manusiawi yang bermartabat.⁴ Pluralitas agama digunakan untuk menunjukkan paham keberagaman yang didasarkan pada pandangan bahwa agama-agama lain yang ada di dunia ini mengandung kebenaran dan dapat memberikan manfaat serta keselamatan bagi penganutnya. Alwi Shihab memberikan pengertian pluralisme sebagai berikut:

1. Pluralisme tidak semata-mata menunjukkan pada kenyataan tentang adanya kemajemukan. Namun yang dimaksud pluralisme adalah keterlibatan aktif terhadap kenyataan kemajemukan tersebut.
2. Pluralisme harus dibedakan dengan kosmopolitanisme yang hanya hidup berdampingan, tapi tidak ada hubungan keakraban khususnya hubungan religius.
3. Konsep pluralisme tidak dapat disamakan dengan relativisme yang tidak mengakui adanya suatu kebenaran yang berasal dari suatu agama. Relativisme tidak mau menerima suatu kebenaran universal yang berlaku antara semua dan sepanjang masa.
4. Pluralisme agama bukanlah sinkretisme, yakni menciptakan suatu agama baru dengan memadukan unsur tertentu atau sebagian komponen ajaran dari beberapa agama

3 John M. Echol dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia* (cet. viii, Jakarta: Gramedia, 1980), hlm. 316.

4 *The Black Well Encyclopedia of Political Institutions* (New York: Blackwell References, 1987), hlm.426. Dalam Masykuri Abdillah, *Demokrasi di Persempangan Makna: Respons Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi (1966-1993)*, hlm.147.

untuk dijadikan sebagai integral dari agama baru tersebut.⁵

Pluralisme sebagai sebuah watak untuk menjadi plural dalam ilmu politik dapat didefinisikan sebagai berikut: *pertama*, sebagai teori yang menentang kekuasaan politik negara dan bahkan menganjurkan untuk meningkatkan pelimpahan dan otonomi organisasi-organisasi utama yang mewakili keterlibatan seseorang dalam masyarakat. *Kedua*, keadaan toleransi keberagaman kelompok-kelompok etnis dan budaya dalam suatu masyarakat atau negara, dan keragaman kepercayaan atau sikap yang ada pada sebuah badan atau institusi.⁶

Pengertian pluralisme dalam perspektif Nurcholish Madjid adalah lebih dekat pada pengertian pluralis yang kedua, yakni situasi dan kondisi yang merupakan sunatullah diciptakan penuh keragaman (multikulturalisme) yang membutuhkan kearifan universal. Misalnya, mengadakan toleransi terhadap agama, ras, budaya, etnis, dan aliran kepercayaan dalam suatu negara atau institusi. Oleh karena itu, pluralitas eksistensi agama yang disebutkan kemudian sebagai eksistensi agama, tidaklah serta merta dianggap sebagai suatu kesesatan yang terkutuk, tetapi merupakan kekerasan sejarah dari esensi agama yang esoteristis.⁷

III. Epistemologi Pluralisme

Salah satu hal yang mewarnai dunia dewasa ini adalah pluralisme keagamaan, demikian ungkap Coward.⁸ Manusia hidup dalam pluralisme dan merupakan bagian dari pluralisme itu sendiri, baik secara pasif maupun aktif. Pluralisme merupakan kenyataan sejarah yang tidak bisa diingkari keberadaannya.

Apabila merujuk kepada penegasan Al-Quran, Islam bukan saja menerima legitimasi pluralisme agama, tapi juga menganggap-

5 Alwi Shihab, *Islam Inklusif Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama* (cet. v, Bandung: Mizan, 1999), hlm. 41-43.

6 J.A Simpson dan E.S.C. Welner, *The Oxford English Dictionary*, (Vol. XI Coxpord : Clarendom Press, Edisi Ke 2, 1989) hlm. 1089.

7 *Ibid.*, hlm. 70.

8 Harold Coward, *Pluralisme dan Tantangan Agama-agama* (Yogyakarta: Kanisius, 1989), hlm. 5.

nya sebagai bersifat sentral dalam sistem kepercayaannya. Banyak sekali ayat yang menegaskan hal itu antara lain:

Kepada setiap kamu sekalian Kami berikan aturan hukum (*syariah*) dan jalan hidup (*minhaj*). Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu semua dijadikan satu komunitas, tapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu. Hanya kepada Allahlah kembali kamu sekalian lalu diberitahukan kepadamu apa yang kamu perselisihkan itu (QS. al- Maidah (5): 48).

Ini merupakan penegasan gamblang yang menyokong pluralisme agama dan hukum yang sementara ini banyak diabaikan. Para ahli tafsir klasik telah mengemukakan signifikansi ayat di atas. Bagian paling penting dari ayat itu adalah “kepada setiap kamu sekalian Kami berikan aturan hukum (*syariah*) dan jalan hidup (*minhaj*)”. Kalimat “setiap kamu sekalian” jelas menumpuk pada komunitas-komunitas yang berbeda.

Al-Quran mengisyaratkan adanya agama Tuhan pada setiap rumpun manusia di masa lalu yang harus dihormati, sebagaimana sikap Islam terhadap Ahli Kitab. Pada dasarnya bukan saja al-Qur’an yang mengisyaratkan tentang menghargai dan menghormati eksistensi pluralism, tetapi yang menyatakan dirinya juga sebagai pluralistis kepada Tuhan Allah sendiri. Bentuk pluralisme yang dimaksud adalah eksistensi Allah sebagai Yang Maha Tunggal secara substansial dan memiliki pancaran dan emanasi secara semiotik yakni Yang Satu di dalam yang Sembilan puluh Sembilan. Maksudnya bahwa secara esensial Tuhan Tunggal dan menjadi plural dalam eksistensialnya yakni memiliki *asma’u al husna*.

Dalam Islam pluralisme diterima sebagai rahmat Allah, sebagai karunia yang mencerdaskan umatnya melalui dinamika perbedaan yang konstruktif dan optimistis.⁹ Dalam sebuah hadis nabi sendiri disebutkan bahwa “perbedaan pendapat di kalangan umatku

9 Amidhan, “Pluralitas Sebuah Kenyataan” dalam Nurcholis Madjid et.al, *Kehampaan Spiritual Masyarakat Modern: Respon dan Transformasi Nilai-nilai Islam Menuju Masyarakat Madani* (Cet.VI; Jakarta: Mediacita, 2002), hlm. 46.

adalah rahmat” (*ikhhtilafu ummmati rahmatun*). Hadis tersebut cukup kuat mengindikasikan semangat pluralisme itu, dan dengan demikian jelas sekali bahwa pluralisme adalah kenyataan sejarah. Pemahaman sederhana tentang pluralisme adalah *how to treat others while we disagree*, yakni bagaimana kita memperlakukan orang lain saat kita tidak sepaham. Sedangkan memaafkan perbedaan merupakan prasyarat utama pluralisme bagi masyarakat multikultural seperti Indonesia.¹⁰ M. Deden Ridwan menyatakan bahwa pluralisme merupakan inti (*core*) nilai kemanusiaan yang mustahil bertentangan dengan nilai keagamaan.¹¹ Akan tetapi, pluralisme tanpa adanya seperangkat nilai dan aturan yang menemaninya akan menciptakan ketegangan-ketegangan.¹²

IV. Ontologi Pluralisme

Pluralisme tidak dapat dipahami hanya dengan mengatakan bahwa masyarakat kita majemuk, beraneka ragam, terdiri dari berbagai agama dan suku, yang justru hanya bisa menggambarkan kesan fragmentasi, bukan pluralisme. Pluralisme juga tidak boleh dipahami sekedar sebagai “kebaikan negatif” (*negative good*), hanya ditilik dari kegunaannya untuk memungkinkan fanatisme (*to keep fanaticism at bay*),¹³ akan tetapi pluralisme harus dipahami sebagai “pertalian sejati kebhinekaan dalam ikatan-ikatan keadaban” (*genuine engagment of diversities within the bonds of civility*). Bahkan pluralisme merupakan suatu keharusan bagi keselamatan umat manusia (QS. al-Baqarah (2): 25). Namun salah satu masalah besar paham pluralisme dalam beragama adalah bagaimana suatu teologi mendefinisikan dirinya di tengah-tengah agama lain, “*what should one think about religious others than one’s own?*”, apakah ada

10 Abdurrahman Mas’ud, *Menuju Paradigma Islam Humanis* (Yogyakarta: Gama Media, 2003) hlm. 83.

11 M. Deden Ridwan, “Membangun Teologi Kerukunan” dalam *Ibid*, hlm. 74.

12 Bahtiar Effendy, *Masyarakat Agama dan Pluralisme Keagamaan: Perbincangan Mengenai Islam, Masyarakat Madani dan Etos Kewirausahaan* (Yogyakarta: Galang Press, 2001) hlm. 42.

13 Budhy Munawar Rachman, *Islam Pluralis Wacana Kesetaraan Kaum Beriman* (Cet.I; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004) hlm. 39.

kebenaran dalam agama lain yang implikasinya adalah apakah ada keselamatan dalam agama lain.

Kondisi yang dikehendaki oleh konsep pluralisme agama sebagaimana ditulis oleh Michael Amalados—adalah: 1) Apabila setiap agama demikian juga komunitas ummatnya dapat memberi tempat kepada penganut agama lain tidak hanya dalam perasaan toleransi sebagai warga negara kelas kedua; 2) Apabila setiap agama dapat membedakan antara keyakinan dengan konsekuensi moral mereka; 3) Apabila ada konsensus yang pasti dapat dicapai oleh masyarakat yang berbeda-beda keyakinan untuk saling menghormati tatanan moral yang penting bagi pribadi dan sikap sosial mereka.¹⁴ Tiga kondisi tersebut sebenarnya dapat diwujudkan oleh kalangan umat beragama, selama antarmereka tercipta saling pengertian yang mendalam walaupun tetap hidup dalam agama yang berbeda-beda. Misalnya sekarang bagaimana cara yang harus ditempuh oleh umat beragama sehingga dapat mengembangkan sikap yang positif, arif dan konstruktif.

Tabrani dan Syamsul Arifin mengusulkan, untuk mengembangkan pluralisme menjadi kekuatan sinergis dalam kehidupan masyarakat di masa depan, maka agama-agama dalam konteks ini dijadikan landasan etis.¹⁵ Pluralisme keagamaan memang merupakan tantangan khusus yang dihadapi agama-agama dunia dewasa ini. Seperti pengamatan Coward,¹⁶ setiap agama muncul dalam lingkungan yang plural ditinjau dari sudut agama dan membentuk dirinya sebagai tanggapan terhadap pluralisme tersebut. Jika pemeluk agama tidak memahami secara benar dan arif, pluralisme agama akan menimbulkan dampak tidak hanya berupa konflik antara umat beragama, tetapi juga konflik sosial dan disintegrasi bangsa. Kendati agama memiliki fungsi pemupuk persaudaraan dan fungsi tersebut telah dibuktikan dengan fakta-fakta kongkret dari zaman

14 Michael Amalado, *Making All Things New* (New York: Orbit Book, 1990), hlm. 14-15.

15 Tabrani dan Syamsul Arifin, *Islam Pluralisme Budaya dan Politik* (Yogyakarta: Sypress, 1994), hlm. 34.

16 Harold Coward, *Pluralisme dan Tantangan Agama-agama* (Yogyakarta: Kanisius, 1989), hlm. 167.

ke zaman, namun di samping fakta yang positif itu terdapat pula fakta negatif, yaitu perpecahan antar manusia, dan konflik antar umat beragama.

Salah satu masalah dari paham pluralisme yang telah menyulut perdebatan abadi sepanjang masa menyangkut masalah keselamatan adalah bagaimana suatu teologi dari suatu agama mendefinisikan dirinya di tengah agama-agama lain. Dalam bahasa John Lyden seorang ahli agama-agama, *what should one think about religious other than one's own?* (apa yang seseorang pikirkan mengenai agama lain dibandingkan agama sendiri?). Nampaknya tantangan utama pluralisme adalah adanya *truth claim* (klaim kebenaran) atau klaim absolutisme, dan wilayah yang paling fundamental dalam kaitan ini adalah diberlakukannya standar ganda di dalam memberikan penilaian¹⁷ terhadap kepercayaan satu sama lain yang secara khusus cenderung untuk membandingkan ideal kepercayaan sendiri dengan realitas kepercayaan orang lain.

Klaim absolutisme dilakukan oleh agama satu terhadap agama lain, dan klaim tersebut berlaku bagi semua agama, baik Islam, Kristen, Hindu maupun Yahudi. Dalam tradisi Hindu misalnya, seorang Hindu mempercayai bahwa seseorang dapat mencapai *santa darma*, kebenaran eternal, yang menjelma dalam bahasa manusia sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Veda. Ada toleransi umum yang terkait dengan anggapan “bahwa cepat atau lambat setiap orang pada waktunya akan memasuki atau mengalami kesempatan memahami Veda”.

Menurut Coward, agama Hindu memandang agama-agama lain sebagai wahyu Tuhan dan sebagai penyediaan jalan berbeda yang dengannya kaum beriman dapat mencapai pembebasan dari

17 Orang-orang Kristen ahli untuk membandingkan ideal yang menakjubkan dari kepercayaan Kristen dengan realitas yang menyakitkan dari masyarakat muslim, dan orang Islam juga sama-sama ahli dalam menyoroti persoalan-persoalan dalam masyarakat yang dipengaruhi oleh keyakinan Kristen sambil menunjuk tidak dilaksanakannya ideal Islam sebagai sebab persoalan ini. Lebih jelas baca Hugh Goddard, *Christians and Muslims: From Double Standards to Mutual Understanding*, diterjemahkan oleh Ali Noer Zaman dengan judul *Menepis Standar Ganda Membangun Saling Pongaertian Muslim-Kristen* (Cet. I, Yogyakarta: Qalam, 2000), hlm. 12.

karma-samsara-nya. Hindu melihat dirinya sebagai agama yang sangat terbuka dan toleran.¹⁸ Namun karena agama Hindu menegaskan bahwa Veda merupakan wahyu yang paling sempurna dari kebenaran ilahi, maka agama Hindu juga melihat dirinya sebagai pemberi kriteria yang harus digunakan sebagai dasar untuk menguji wahyu-wahyu dari semua agama lainnya. Jadi sebagaimana kata Coward,¹⁹ toleransi Hindu terhadap agama-agama lain langsung sebanding dengan keselarasan agama-agama itu dengan Veda. Menurut Hindu, hanya ada satu wahyu (yang terdapat dalam Veda), selainnya (Taurat, perjanjian baru, atau al-Quran) dilihat dari perwujudan kedua yang harus diuji dengan menggunakan wahyu Hindu. Inilah yang menurut Coward, toleransi Hindu terbatas, atau ada batasnya. Orang-orang Hindu tidak berbeda dengan pemeluk agama-agama lain yang meyakini bahwa mereka memiliki wahyu yang benar dan berusaha memaksakan kebenaran (*truth claim*) kepada orang lain. Di sinilah persoalan klaim kebenaran dan keaslian itu berlaku bagi semua agama.

Klaim absolutisme agama bagi orang-orang Yahudi adalah, bahwa mereka mengaku sebagai umat atau “manusia pilihan Tuhan”, sebagai perantara Tuhan untuk menyampaikan wahyu kepada umat manusia. Untuk menjadi Yahudi, orang harus mempunyai hubungan khusus dengan Tuhan.

Agama Budha mengklaim, bahwa penghargaan yang sesungguhnya mengenai keberadaan manusia terjadi sebagian besar dan efektif dalam ajaran Budha Gautama. Menurut Budha, Dharma adalah yang memelihara kebenaran penuh, penjelasan yang khusus dan efektif serta akhir diantara iluminasi dan wahyu tentang dunia.

Dalam agama Islam ada kepercayaan tegas bahwa Muhammad adalah nabi dan melalui al-Quran Tuhan telah mewahyukan kepada manusia akan kebenaran agama itu. Bahwa agama yang paling benar adalah Islam, segala penyembahan harus kepada Allah, selain-Nya adalah syirik.

Dalam kepercayaan Kristen, Yesus Kristus adalah peletak dasar dan pusat agama, Dia juga Tuhan dalam bentuk manusia. Dogma

18 Harold Coward, *Op cit*, hlm. 144.

19 *Ibid*.

ini merupakan konsekuensi sejarah yang alami bagi orang-orang Kristen yang menganggap agama mereka sebagai satu-satunya agama yang benar, yang dibangun oleh Tuhan dalam dirinya dan akibat dari itu adalah bahwa semuanya menempuh jalan menuju Tuhan. Dari sinilah kemudian timbul perintah untuk mengajak semua orang bersedia menerima agama Kristen serta menjadi anggota gereja. Masing-masing dari tradisi agama besar dengan demikian menempuh satu jalan atau jalan lain yang memiliki kelebihan khusus.

Sebagaimana kata Hans Kung,²⁰ posisi Katolik tradisional memiliki ungkapan yang tidak plural: “Tak ada keselamatan di luar Gereja”. Gereja suci Roma tegas-tegas meyakini, bahwa tak seorangpun di luar gereja Katolik, baik orang kafir atau Yahudi atau orang yang tidak beriman, tidak juga orang yang terpisah dari gereja akan ikut bersama-sama dalam kehidupan yang kekal, tetapi akan binasa dalam api kekal yang disediakan untuk setan dan anak cucunya jika orang-orang tersebut tidak tergabung dengan Gereja Katolik sebelum mati. Klaim-klaim kebenaran seperti ini menurut Kung sudah berjalan selama lebih dari 1200 tahun.

Menurut Hick,²¹ bahwa pluralisme agama mengimplikasikan pengakuan terhadap fondasi bersama bagi seluruh varitas pencarian agama dan konvergensi agama-agama dunia. Bagi sebagian lainnya, pluralisme agama mengimplikasikan saling menghargai di antara berbagai pandangan dunia (*world-view*) dan mengakui sepenuhnya perbedaan tersebut. Jika yang pertama menekankan kebebasan beragama individu, maka yang kedua menekankan pengakuan atas denominasi sebagai pemberi jawaban khas. Hick memang, sebagaimana kata Soroush, adalah seorang teolog yang membela pluralisme dan inklusivisme sejajar dengan Kung, Smart dan Toynbee.²² Tetapi, men-

20 Hans Kung, “Sebuah Dialog Kristen-Islam” dalam Jurnal *Paramadina*, Edisi Vol. 1, No. 1, Desember (Jakarta: Paramadina, 1998), hlm.11.

21 Zakiyuddin, *Ambivalensi Agama, Konflik dan Nirkekerasan* (Yogyakarta: Lesfi, 2002), hlm. 20.

22 Abdul Karim Soroush, *Menggugat Otoritas dan Tradisi Agama*, terj. Abdullah Ali (Bandung: Mizan, 2003), hlm. 104.

gapa pemeluk agama monoteis justru inheren dengan intoleransi dan kekerasan? Menurut Rodney Stark,²³ klaim pemeluk agama monoteisme yang partikularistik-subyektif—bahwa agama yang dipeluknya adalah satu-satunya yang benar, yang hanya percaya pada satu Tuhan, Yang Esa dan Sejati (*One True God*)—banyak memicu konflik. Stark menyoroti subyektivisme para pemeluk agama monoteistik (baik Yahudi, Kristen maupun Islam) yang memandang rendah agama lain. Melalui penelitiannya, Stark berkesimpulan, bahwa perbedaan agama dalam seluruh masyarakat berakar pada relung-relung sosial, kelompok-kelompok orang yang saling berbagi preferensi berkaitan dengan intensitas keagamaan.²⁴ Ketika beberapa agama partikularistik yang kuat saling mengancam antara satu dengan yang lain, maka konflik akan termaksimalisasikan, begitu pula tingkat intoleransi.²⁵

Dalam membangun sebuah peradaban itu, bukan hanya perhatian kita lebih besar pada aspek esoterismenya, tetapi dalam tradisi filsafat perenial, persoalan esoterisme menjadi tema sosial yang tidak kalah pentingnya dari kajian esoterisme. Keduanya harus menjadi kajian yang utuh yang tidak bisa dipisahkan dengan esoterisme yang secara intrinsik memang dengan sendirinya bersifat universal, sehingga semangat inklusif meniscayakan pluralitas eksistensi agama. Pemahaman keagamaan yang inklusif dari setiap umat beragama merupakan cara terbaik dalam kehidupan plural.

Keteladan dalam hidup bersesama di tengah keberagaman pada dasarnya telah dicontohkan oleh Rasulullah Saw., di mana peristiwa primordial sakral itu pernah terjadi ketika Rasulullah mendapat teguran dari Allah Swt. disaat adanya keinginan untuk memaksa rakyat untuk menerima dan mengikuti agamanya, sehingga dalam suasana yang demikian itu turunlah ayat Al-Quran, Surat Yunus (10: 99).

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرَهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا
مُؤْمِنِينَ

23 Rodney Stark, *One True God: Resiko Sejarah Bertuhan Satu*, terj. M. Sadat Ismail (Yogyakarta: Qalam, 2003), hlm. 171-173.

24 *Ibid.*, hlm. 175.

25 *Ibid.*, hlm. 183.

Terjemahnya:

Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya

Berdasarkan pada prolog yang terjadi pada diri Rasulullah, maksud ayat ini memberikan penegasan bahwa terjadinya perbedaan pandangan agama yang menjadi keyakinan suatu masyarakat merupakan *sunnatullah* yang tidak bisa diingkari. Adanya perbedaan pandangan dan keyakinan ini memberikan suatu nilai positif untuk senantiasa berpacu dan berkompetisi dalam memperbanyak kebajikan amal, sehingga memudahkan seseorang akan berjuang dan berusaha keras menempatkan dirinya sesuai dengan kehendak Tuhan sebagai khalifah. Dari berbagai kompetisi di antara sesama manusia akan memberikan warna terhadap iman, selanjutnya akan menjadi suatu prestasi moral, sehingga iman akan dipertahankan dengan sebaik-baiknya.

Menurut Nurcholish Madjid, pluralitas manusia adalah kenyataan yang dikehendaki Tuhan. Pernyataan Al-Quran bahwa manusia diciptakan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya saling mengenal dan saling menghormati (QS. 49: 13), menunjukkan pengakuannya terhadap pluralitas. Pluralisme adalah sistem nilai yang memandang eksistensi kemajemukan secara positif dan optimis dan menerimanya sebagai suatu kenyataan dan sangat dihargai. Selanjutnya menurut Nurcholish, pluralisme atau kemajemukan masyarakat pada hakekatnya tidak cukup hanya dengan sikap mengakui dan menerima kenyataan bahwa masyarakat itu bersifat majemuk, tapi lebih mendasar harus disertai dengan sikap tulus menerima kenyataan bahwa masyarakat kemajemukan adalah sesuatu yang bernilai positif dan merupakan rahmat Tuhan kepada manusia.²⁶

Sikap tulus menerima kenyataan tentang kemajuan masyarakat dalam suatu bangsa, merupakan bagian dari iman seseorang, terutama kaum muslim. Muslim yang patuh pada perintah Allah adalah

²⁶ *Ibid.*

yang memahami Islam secara total dan menjalankannya secara totalitas. Yang tidak dikehendaki adalah muslim dalam konteks parsial, maksudnya beragama hanya pada faktor ritual dan simbol-simbol saja. Pemahaman dan kesediaan secara arif menerima kenyataan yang merupakan wujud perbuatan Tuhan merupakan faktor yang dapat memperkaya pertumbuhan kultural melalui interaksi dinamis dan pertukaran budaya yang beraneka ragam. Oleh karena itu, pluralisme dalam konteks ini merupakan suatu pengikat untuk memotivasi dalam pemerikayaan budaya bangsa.

Pluralitas tidak hanya dipahami dengan lisan atau sekedar teoritis yang pada dasarnya hanya memberikan kesan fragmentasi yang tidak boleh dipahami sebagai kebaikan negatif. Yang dilihat adalah nilai pragmatismenya atau sekedar untuk menyingkirkan fanatisme sebagai sesuatu yang harus dipahami sebagai “Pertalian sejati keberanekaan dalam ikatan-ikatan keadaban”. (*Genuine engagement of diversities within the bonds of civility*).²⁷ Dengan demikian, memahami pluralitas dalam semua agama merupakan suatu keharusan bagi keselamatan umat sebagai pemakmur alam (*khalifatullah*).

Menurut Nurcholish, wacana Islam dan pluralitas yang dimaksud adalah relevan dengan persoalan toleransi. Pluralitas menghendaki adanya keselamatan umat manusia dalam menjalani aktivitas keduniaan dalam bentuk kemasyarakatan dan kebangsaan. Begitu pula dengan masalah toleransi, karena toleransi ini adalah prosedural, maka persoalan-persoalan tata cara pergaulan yang “enak” antara kelompok yang berbeda-beda yang harus dipahami secara prinsip.²⁸ Oleh karena itu, adanya kewajiban ajaran sebagaimana persoalan pluralitas, prinsip toleransi kata Nurcholish adalah salah satu asas masyarakat madani (*civil society*) yang dicita-citakan.²⁹

27 *Ibid.*

28 *Ibid.*, hlm. 63.

29 Banyak bukti tentang terciptannya masyarakat madani (*Civil Society*) dari peradaban sejarah yang pernah tumbuh di masyarakat Eropa, antara lain, adalah dimulai oleh UU Toleransi 1689” (*The Toleration Act of 1689*) di Inggris yaitu di gereja Anglikan, sedangkan di Katolik dipandang sebagai yang ilegal, kemudian pada abad 18 toleransi dikembangkan, karena tidak adanya kepedulian terhadap agama. *Ibid.*, hlm. 64.

V. Aksiologi dan Emanasi Pluralisme dalam Islam Adalah Suatu Keniscayaan

Masalah pluralisme dan toleransi adalah persoalan yang merupakan bagian dari ajaran Islam. Ini dapat disebut sebagai kenyataan hukum alam (*sunatullah*) yang tidak akan berubah dan tidak bisa ditolak. Islam adalah agama yang kitab sucinya sangat mengakui keberadaan hak-hak agama, budaya atau ras lain untuk mengimplementasikan ajaran-ajarannya, kecuali agama yang ajarannya berdasar pada animisme yang mengarah pada *syirik*.

Dalam rangka terjalinnya keakraban hubungan antara agama yang berbeda di Indonesia sebagai identitas bangsa yang plural, pemerintah Orde Baru berusaha menciptakan kondisi yang dapat mengakrabkan dan mengharmonisasikan hubungan antara agama. Ketika menjabat Menteri Agama, Alamsyah Ratu Prawiranegara mencetuskan program *Tri Kerukunan Umat Beragama*. Karena ia melihat kebutuhan terhadap kerukunan itu benar-benar menjadi kebutuhan, mengingat faktor pertentangan sosial sebagaimana yang dipicu oleh faktor agama. Dalam berbagai kesempatan, ia menyatakan bahwa musuh umat beragama bukanlah umat beragama lain, melainkan kebodohan, kemiskinan, dan keterbelakangan.³⁰

Pandangan tentang kesatuan agama dan kesatuan umat di atas akan melahirkan semangat eksklusif, yaitu keyakinan kebenaran agama yang terbuka. Hal ini ditonjolkan oleh Nurcholish karena adanya fenomena eksklusifisme dari sebagian umat beragama. Pandangan eksklusif demikian, khususnya dalam umat Islam sebagai mayoritas di Indonesia, bagi kalangan modernis Islam perlu segera direnovasi menuju kepada pemahaman yang inklusif.

Pemahaman keagamaan secara inklusif yang ditawarkan oleh Nurcholish, pada dasarnya berdalih pada sejumlah ayat dalam Al-Quran di antaranya disebutkan dalam QS. (21: 25):

وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه ...

Terjemahnya:

Tuhan tidaklah mengutus seorang Rasul pun sebelum Muham-

30 *Media Amal Bakti*, Kanwil Depag, No. 55/IV/1998, hlm. 27.

mad Saw, melainkan mereka atau diberi wahyu untuk men-tauhidkan hanya kepada-Nya saja....

Kemudian pada ayat lain Allah SWT. menyebutkan dalam QS. (21: 92) bahwa:

ان هذه أمة واحدة وانا ربكم فاعبدون

Terjemahnya:

Bahwa sesungguhnya seluruh manusia adalah umat yang tunggal, maka yang pantas disembah hanyalah Tuhan yang Esa saja”

Atas dasar prinsip-prinsip yang dinyatakan dalam ayat-ayat tersebut di atas, Nurcholish menjelaskan bahwa adanya prinsip kemajemukan keagamaan itu (*religius plurality*), maka ajaran itu tidak perlu diartikan secara langsung sebagai pengakuan akan kebenaran semua agama dalam bentuknya yang real pada kehidupan sehari-hari. Akan tetapi ajaran kemajemukan itu memudahkan pengertian dasar resiko yang akan ditanggung oleh pengikut agama masing-masing. Sikap ini ditafsirkan sebagai salah satu harapan kepada semua agama yang ada, yaitu disebabkan semua agama pada mulanya menganut prinsip yang sama. Bentuk persamaan di sini adalah keharusan manusia berpasrah pada Tuhan Yang Maha Esa.

VI. Kesimpulan

Pluralisme merupakan kenyataan sejarah yang tidak bisa diingkari keberadaannya, dan merupakan tantangan yang dihadapi agama-agama dunia dewasa ini. Adanya *truth claim* atau klaim absolutisme, baik Islam, Kristen, Hindu, Budha maupun Yahudi, merupakan sesuatu yang mendesak untuk segera diatasi.

Untuk menghadapi tantangan pluralisme, diperlukan pemahaman yang plural terhadap agama. Setiap agama hendaknya dinilai sebagai tradisi-tradisi yang utuh, bukan sebagai fenomena keagamaan yang partikular. Tradisi perbedaan keagamaan hendaknya dianggap sebagai sama-sama produktif (*equally-productive*) dalam mengubah manusia dari perhatian pada diri sendiri (*self-centred-*

ness) menuju perhatian pada Tuhan (*reality-centredness*).

Semua agama cenderung memiliki klaim absolutisme, dan klaim pemeluk agama monoteisme yang partikularistik-subyektif akan berdampak pada konflik antarumat beragama, dan konflik tersebut akan menjadi memuncak jika beberapa organisasi keagamaan yang kuat dan partikularistik hidup berdampingan. Oleh karena itu, dalam memahami persoalan agama-agama perlu wawasan multikulturalisme.

Tantangan teologis paling besar dalam kehidupan beragama sekarang ini, adalah: bagaimana seorang beragama bisa mendefinisikan dirinya di tengah-tengah agama lain. Atau istilah yang lebih teknis—yang bisa dipahami dalam literatur teologi kontemporer—bagaimana bisa berteologi dalam konteks agama-agama. ❀

DAFTAR PUSTAKA

- A. Sirry, Mun'im, *Membendung Militansi Agama: Iman dan Politik dalam Masyarakat Modern* (Jakarta: Erlangga, 2003).
- Abdillah, Masykuri, *Demokrasi di Persimpangan Makna: Respons Intelektual Muslim Indonesia terhadap Konsep Demokrasi (1966-1993)*.
- Ahmed An-Naim, Abdullahi, "Syariat Islam Tidak Bisa Melalui Hukum Positif", *Jurnal Tashwirul Afkar*, Edisi No. 14 Tahun 2003, hlm. 164-165.
- Arifin, Tabrani, & Syamsul, *Islam Pluralisme Budaya dan Politik* (Yogyakarta: Sypress, 1994).
- Coward, Harold, *Pluralisme dan Tantangan Agama-agama* (Yogyakarta: Kanisius, 1989), hlm. 5.
- Effendy, Bahtiar, *Masyarakat Agama dan Pluralisme Keagamaan: Perbincangan Mengenai Islam, Masyarakat Madani dan Etos Kewirausahaan* (Yogyakarta: Galang Press, 2001) hlm. 42.
- Goddard, Hugh, *Christians and Muslims: From Double Standards to Mutual Understanding (Menepis Standar Ganda Membangun Saling Pengertian Muslim-Kristen)* terj. Ali Noer Zaman, Cet. I, (Yogyakarta: Qalam, 2000).
- Kung, Hans, "Sebuah Dialog Kristen-Islam", *Jurnal Paramadina*, Vol.1 No. 1 Desember (Jakarta: Paramadina, 1998).
- M. Echol, John & Shadily, Hasan, *Kamus Inggris-Indonesia* (Cet. Viii, Jakarta: Gramedia, 1980).
- Madjid, Nurcholis, *Dialog Keterbukaan Artikulasi Nilai Islam dalam Wacana Sosial Politik Kontemporer* (Cet. I, Jakarta: Paramadina, 1998).
- Mas'ud, Abdurrahman, *Menuju Paradigma Islam Humanis* (Yogyakarta: Gama Media, 2003) hlm. 83.
- Nurcholis Madjid et.al, *Kehampaan Spiritual Masyarakat Modern Respon dan Transformasi Nilai-nilai Islam Menuju Masyarakat Madani* (Cet.VI, Jakarta: Mediacita, 2002)
- Rachman, Budhy Munawar, *Islam Pluralis Wacana Kesetaraan*

- Kaum Beriman* (Cet. I, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004).
- Ridwan, M. Deden, *Membangun Teologi Kerukunan*
- Shihab, Alwi, *Islam Inklusif Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama* (Cet. V, Bandung: Mizan, 1999), hlm. 41-43.
- Simpson, J.A., & Welner, E.S.C., *The Oxford English Dictionary*, (Vol. XI, Edisi II, Coxford: Clarendom Press, 1989).
- Soroush, Abdul Karim, *Menggugat Otoritas dan Tradisi Agama, terjemahan Abdullah Ali* (Bandung: Mizan, 2003).
- Stark, Rodney, *One True God: Resiko Sejarah Bertuhan Satu*, terj. M. Sadat Ismail (Yogyakarta: Qalam, 2003).
- The Black Well Encyclopedia of Political Institutions* (New York: Blackwell References, 1987).
- Zakiyuddin, *Ambivelensi Agama, Konflik, dan Nirkekerasan* (Yogyakarta: Lesfi, 2002).